



2024

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogyakarta



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Jl. Sukonandi no.8, Semaki, Kec.Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telp. (0274) – 513492, Website: <https://diy2023.kemenag.go.id>, twitter & instagram : @kemenag.diy



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2024. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja Pada Kementerian Agama, maka penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2024. Laporan Kinerja tahun 2024 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil



kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih baik.

Yogyakarta, 31 Januari 2025



Kepala,

Ahmad Bahiej



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	15
B. Sasaran Kegiatan.....	16
C. Perjanjian Kinerja	39
BAB III. CAPAIAN KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	57
B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	71
C. Analisis Capaian Kinerja	72
D. Realisasi Anggaran	144
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN	
A. PERJANJIAN KINERJA	
B. SK PENYUSUN LAPORAN KINERJA	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Kinerja Pada Kementerian Agama.

Pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) yang dapat tercapai 100%, akan tetapi di satu sisi ada beberapa indikator kinerja satuan kegiatan (IKSK) yang belum tercapai sesuai target. Dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan.

Dari sisi anggaran, pada Tahun 2024 dari total anggaran Rp.139.881.530.000 terealisasi untuk belanja pegawai sejumlah Rp.77.515.303.506, untuk belanja barang Rp.17.404.419.067, belanja modal Rp.44.043.232.08 dan belanja bantuan sosial Rp 0.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian RI dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kebijakan Menteri Agama RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 71 Madrasah dan 78 KUA yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, di antaranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan



menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama

b. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di



- bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
 - c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
 - d. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
 - f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
 - g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.



2. Profil SDM Kanwil Kementerian Agama DIY

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY didukung oleh 4.270 pegawai dengan berbagai latar belakang baik jenis kelamin, agama, pendidikan dan lain-lain. Berikut sajian data pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.

1) Berdasarkan Agama

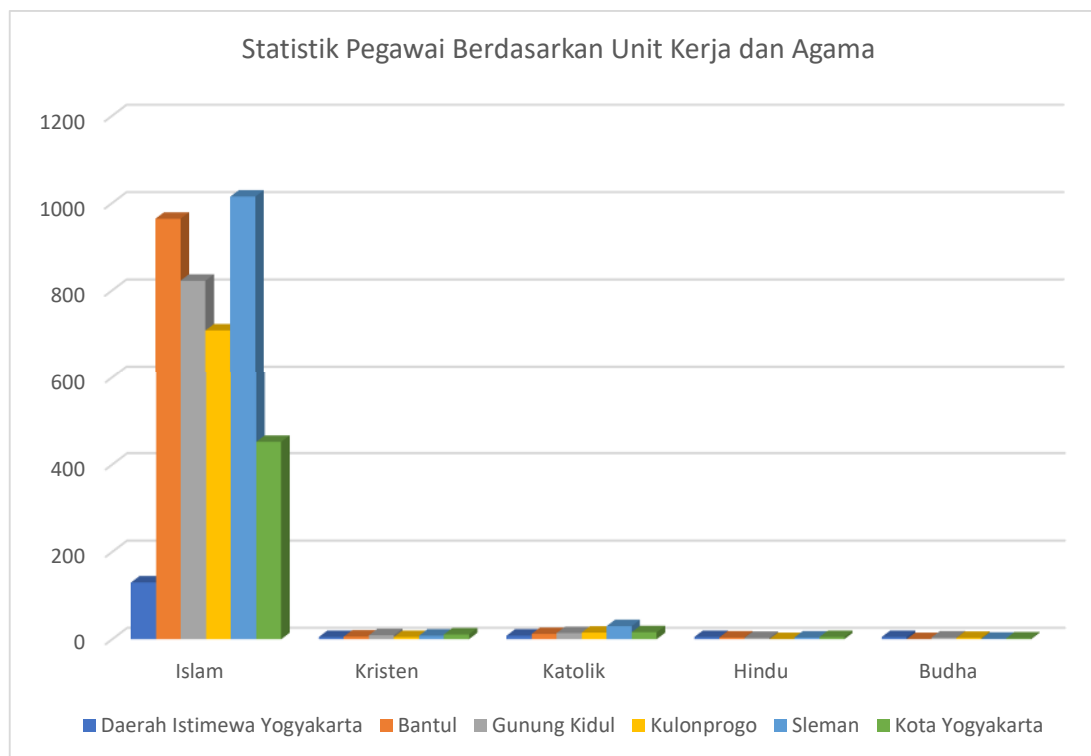
KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN AGAMA

SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Agama					Ket.
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	153	130	5	8	5	5	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	987	965	6	12	4	0	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	853	823	9	14	3	4	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	732	709	5	15	0	3	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.059	1.016	8	30	4	1	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	486	452	11	16	5	2	
Jumlah		4.270	4.095	44	95	21	15	

sispep.kemendag/14/01/2025 11:04





2) Berdasarkan Golongan

KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN GOLONGAN

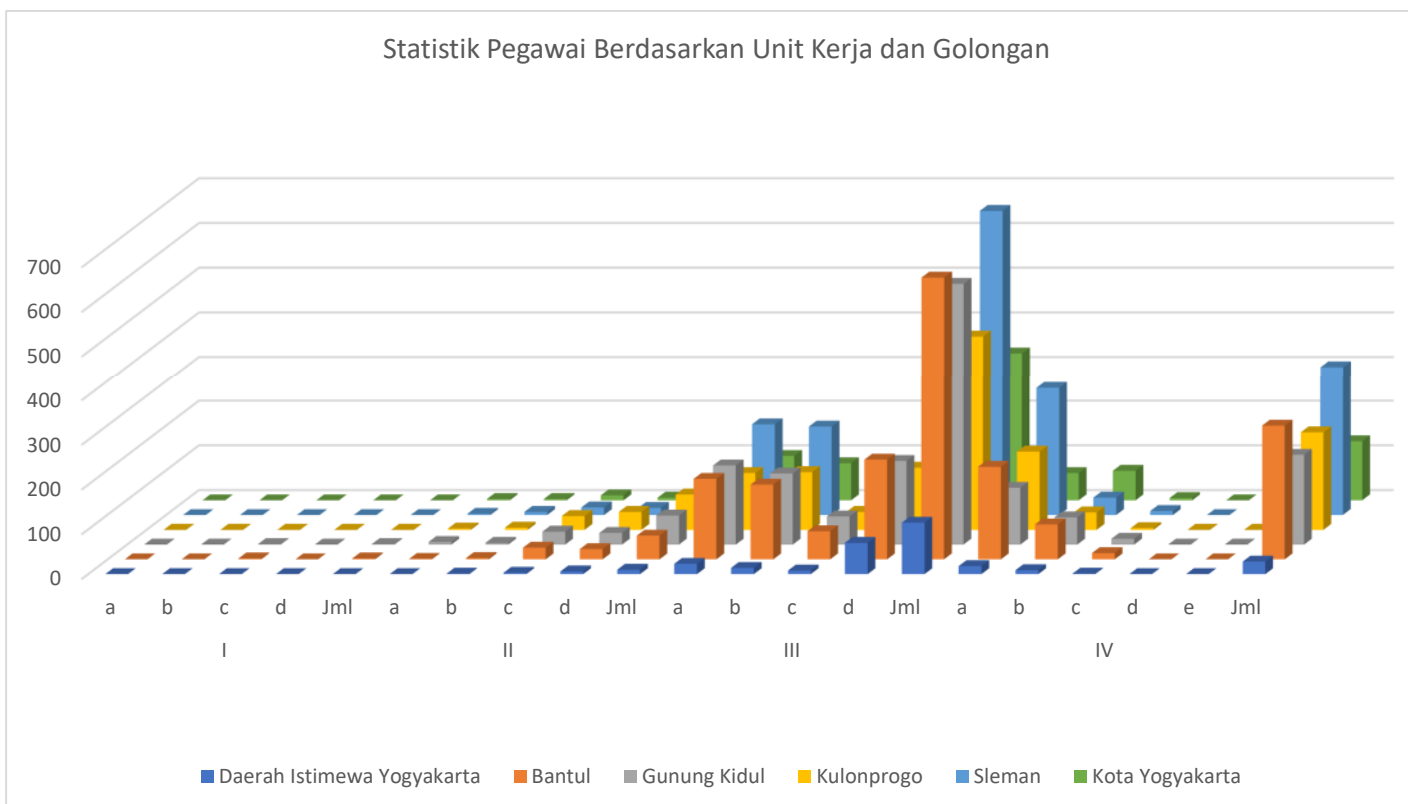
SATUAN KERJA : Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Golongan/Ruang																								Ket.
			I					II					III					IV									
			a	b	c	d	(m)	a	b	c	d	(m)	a	b	c	d	(m)	a	b	c	d	e	f	(m)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	153	0	0	0	0	0	0	1	3	0	10	23	14	8	70	115	18	5	1	0	0	0	28	0		
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	587	0	0	2	0	2	1	3	26	23	53	180	107	63	223	633	357	78	15	0	0	0	290	0		
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	853	0	0	1	0	1	6	4	29	26	66	177	159	63	187	585	327	61	13	0	0	0	201	0		
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	757	0	0	0	0	0	5	5	31	40	79	177	179	40	135	455	175	39	4	0	0	0	218	0		
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1.029	0	0	0	0	0	3	7	17	16	63	203	193	63	215	683	285	10	9	0	0	0	153	0		
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	106	0	0	0	0	0	3	3	11	6	23	00	83	27	122	331	61	66	5	0	0	0	132	0		
Jumlah		4.781	0	0	3	0	3	16	25	117	117	275	809	750	264	990	2.783	873	297	46	0	0	0	1.213	0		

di Yogyakarta, 14 Mei 2024



Statistik Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan





3) Berdasarkan Jenis Kelamin

KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN JENIS KELAMIN

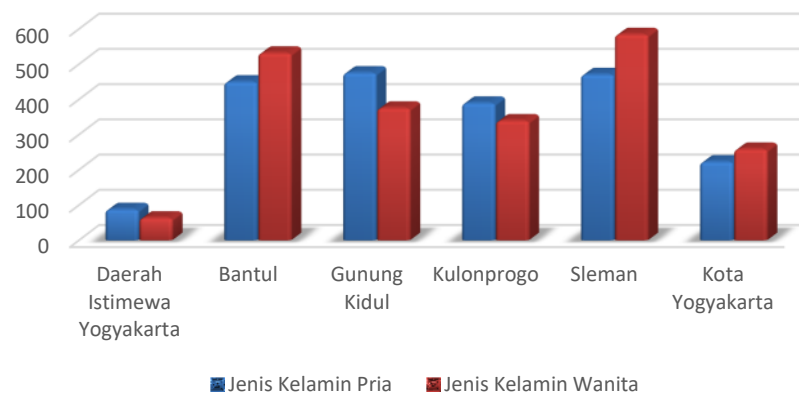
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin		Ket.
			Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	152	88	64	
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	982	450	532	
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	852	476	376	
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	730	390	340	
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,056	471	585	
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	482	223	259	
Jumlah		4,254	2,098	2,156	

simpeg kemenag / 30/01/2025 08:22



Statistik Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin





4) Berdasarkan Pendidikan

KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN PENDIDIKAN

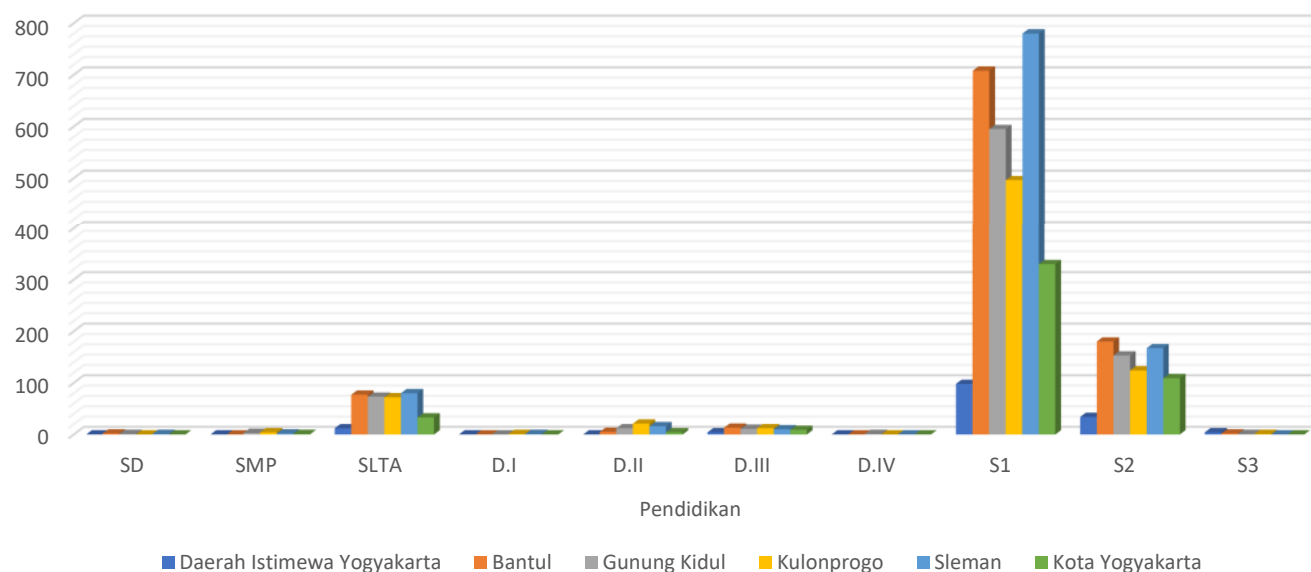
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Pendidikan										Ket.
			SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	153	0	0	12	0	0	4	0	98	34	4	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	987	2	0	77	0	5	13	0	708	180	2	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	853	1	3	73	0	12	11	1	595	153	1	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	732	0	4	72	1	21	12	0	496	124	1	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,059	1	2	80	1	16	10	0	780	167	0	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	486	0	1	33	0	4	9	0	330	109	0	0
Jumlah		4,270	4	10	347	2	58	59	1	3,007	767	8	0

simpeg kemenag / 14/01/2025 11:06



Statistik Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Pendidikan





5) Berdasarkan Usia

KEMENTERIAN AGAMA

STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNIT KERJA DAN USIA

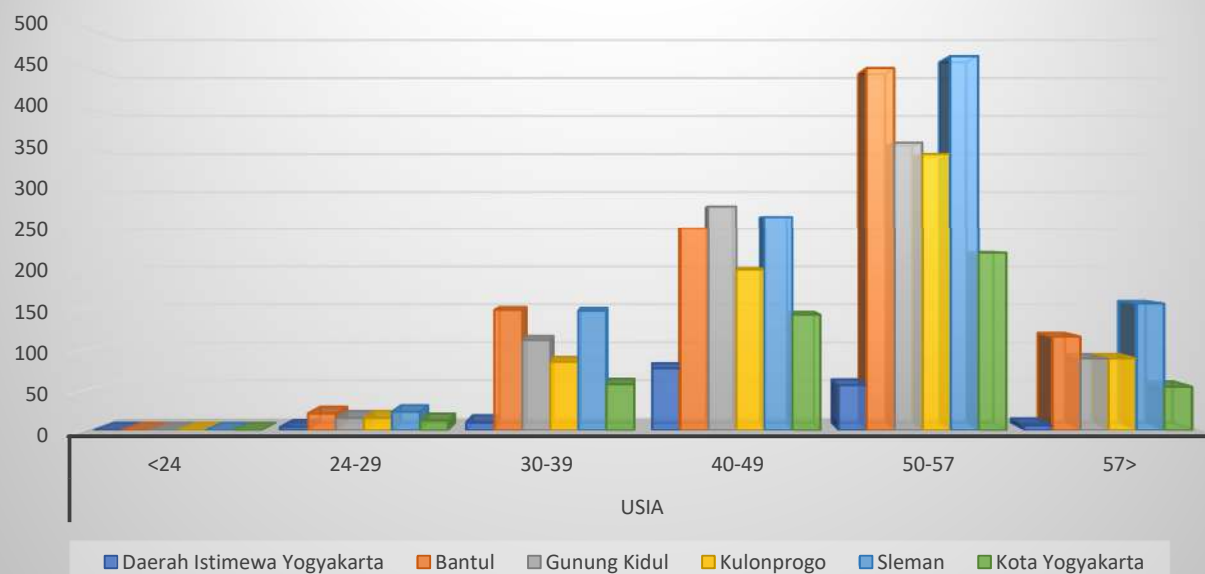
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Usia						Ket.
			<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta	153	0	4	10	77	56	6	0
2	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	987	0	21	149	251	450	116	0
3	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul	853	0	15	112	279	358	89	0
4	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo	732	0	15	85	199	344	89	0
5	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman	1,059	0	23	148	266	465	157	0
6	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta	486	0	12	57	143	220	54	0
Jumlah		4,270	0	90	561	1,215	1,893	511	0

simpeg kemenag / 14/01/2025 11:07



Statistik Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Usia





B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2024, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan haltersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
2. Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2024.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2024.
4. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2024.
5. Lampiran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2022 – 2024 adalah ***“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”***.

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, maka guna mendukung pembangunan pembangunan bidang agama serta pencapaian visi dan misi, disusun tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;



4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

B. Sasaran Kegiatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I Yogyakarta mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta menetapkan 53 Sasaran Kegiatan pada tahun 2022 yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi D. I Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama



Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
	agama	

Sasaran Kegiatanyang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:
Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Nilai kinerja penyuluh agama;
- 2) Persentase penyuluh agama yang dibina;
- 3) Jumlah penjiar agama yang dibina kompetensi;
- 4) Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi



		beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat
--	--	--

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - 2) Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 - 3) Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
- b. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - 2) Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
- c. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.



- d. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - 2) Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
- e. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
- f. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - 2) Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - 3) Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - 4) Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
- g. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitujumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
- h. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja



kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 2) Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 3) Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
- 4) Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
- 5) Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
- 6) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
- 7) Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
- 8) Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
- 9) Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
- 10) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
- 11) Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.



i. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
- 2) Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

3. Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
- b. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap



kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);

- c. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
- d. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - 2) Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

4. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel



Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - 2) Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - 3) Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - 4) Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - 5) Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - 6) Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - 7) Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - 2) Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - 3) Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - 4) Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - 5) Jumlah penghulu yang dibina.



- c. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
- d. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - 2) Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
- g. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.



- h. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

5. Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatn ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Persentase amil yang dibina ;
 - 2) Persentase lembaga zakat yang dibina.
- b. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - 2) Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - 3) Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.



6. Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - 3) Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - 4) Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.



b. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- 1) Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
- 2) Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
- 3) Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
- 4) Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
- 5) Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
- 6) Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
- 7) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.

c. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- 1) Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
- 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
- 3) Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-



pembelajaran;

- 4) Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

7. Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 2) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 3) Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - 4) Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;



- 5) Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - 6) Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - 7) Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
- b. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - 2) Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - 3) Persentase siswa madrasah penerima PIP
 - 4) Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 - 5) Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
- c. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - 2) Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
- d. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan,yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP.



8. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D. I Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - 3) Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 - 4) Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang



mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;

- b. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 2) Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 3) Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - 4) Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - 2) Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - 3) Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;
 - 4) Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.
- d. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan



- 1) Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
- 2) Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

9. Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu:

- a. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatanyaitu:
 - 1) Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi;
 - 2) Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
- b. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;



- 3) Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;
- 4) Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;

10. Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - 1) Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - 2) Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - 3) Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;



- 4) Persentase madrasah yang ramah anak.
- 5) Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
- b. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - 2) Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - 3) Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;
 - 4) Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina;

11. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor



Wilayah Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - 1) Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - 2) Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - 3) Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeridengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase rekomendasi izin orang asing.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - 1) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - 2) Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - 3) Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - 4) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - 5) Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling*kompetensi jabatannya;
 - 6) Persentase data ASN yang diupdate.
- d. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan



sebagai berikut :

- 1) Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - 2) Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 3) Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - 4) Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
- e. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - 2) Persentase tanah yang bersertifikat;
 - 3) Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
- f. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - 2) Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - 3) Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
- g. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - 3) Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
- h. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - 2) Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - 3) Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
- i. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 - 2) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
- j. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
- k. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



- 1) Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - 2) Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - 3) Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - 4) Persentase menurunnya lelang gagal;
 - 5) Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding.
- l. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
- m. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - 2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
- n. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- 1) Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - 2) Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
- o. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional



C. Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	85	Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	468	Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1.850	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	95	%
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	290	Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	4	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	6.800	Lembaga/ Orang
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	46	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%



5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	65	%
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	62	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	65	%
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	70	%
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	485	Orang
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	6	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	152	Konten/ Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan	100	%



		agama yang bermuatan moderasi beragama		
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	%
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang	12	Kegiatan



		bermuatan moderasi beragama		
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	95 5	% %
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	12	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	61	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	11	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	5 18	KUA Pengelola



15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	50	Paket
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	480	Buah
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	60	%
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	58	Layanan
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	200	Lokasi
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	3	KUA
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	KUA
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	9.350	Orang
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	3.860	Anak
		5. Jumlah penghulu yang dibina	47	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka	555	Keluarga



		sakinah/kristiani/bahagia/ sukinah/hittasukhaya		
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	100 0,06	% %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95,10	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	87,62 74,04	% %
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100 94,09 91,33	% % %
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode	83	%



	pola pembelajaran inovatif	pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	100 2 16	% Madrasah Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan 5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	48 10 58 17 369	% % % Penghargaan Kegiatan



		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	55	%
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	87	%



		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	88	%
		4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	66	%
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	100	%
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	100	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagianak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah 3. Persentase siswa madrasah penerima PIP 4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	27.150 2.800 19 40 19	Siswa Siswa % % %
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program	54 30	% %



		pendidikan kesetaraan di pesantren		
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	11.250	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi 2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 4. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	51 75 75 62	% % % %
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang	89 90	% %



		memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	%
		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	88	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG; 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	51 58 95 1	% % % Orang
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	43 50	Madrasah Sekolah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	77 57	% %



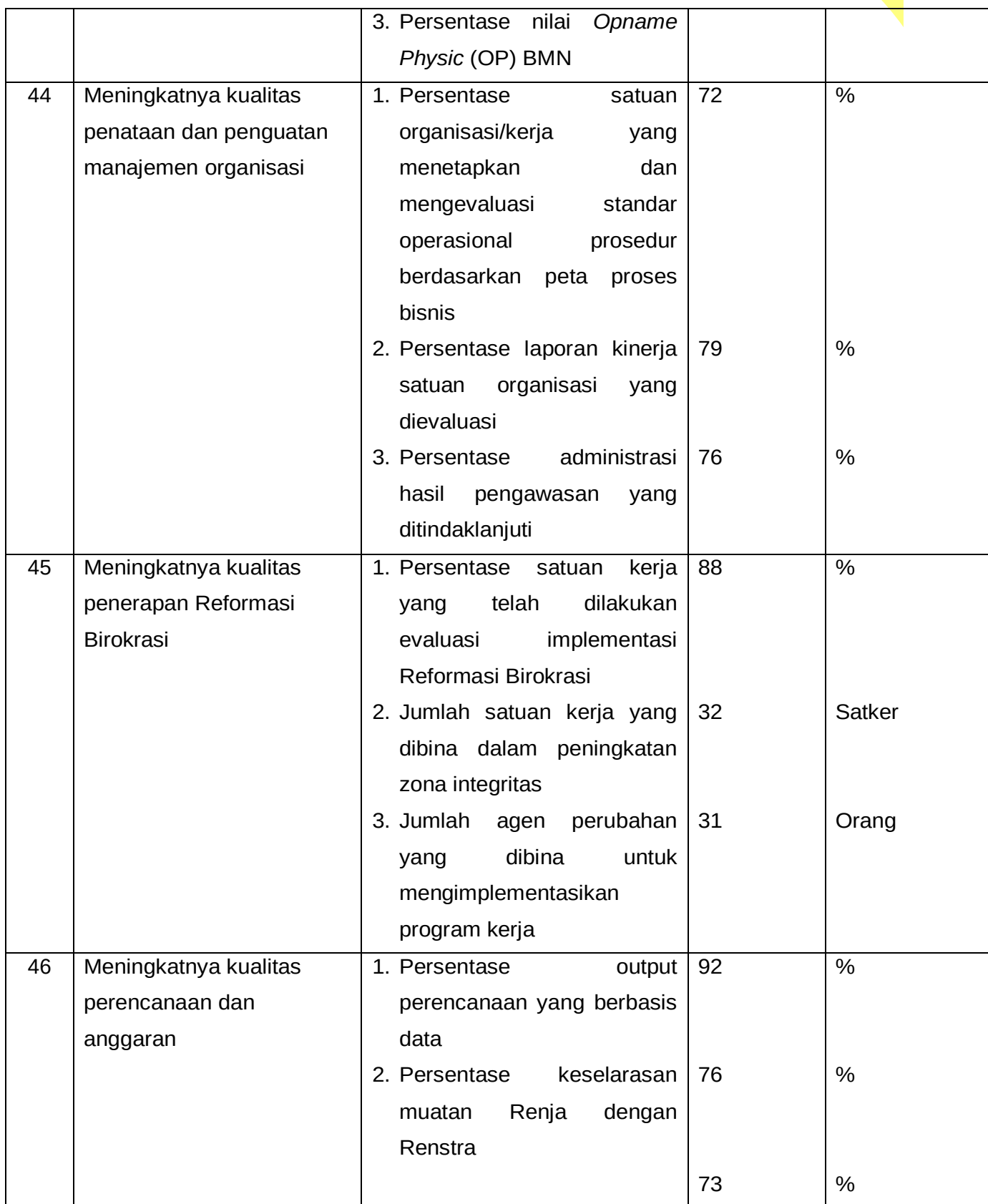
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5 9	% %
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 4. Persentase madrasah yang ramah anak.	100 100 14 34	% % % %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina	15 1	Madrasah Sekolah



		kepeloporan dan kesukarelawanan		
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	32	Gugus
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	3	Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	95	%
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	96	%
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	86	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	88	%
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	83	%
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	65	%
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	55	%



		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 7. Persentase data ASN yang diupdate 8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	66 81 92 77	% % % %
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	94 93 98 97	Laporan % % %
43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya 2. Persentase tanah yang bersertifikat	86 90 90	% % %





		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti		
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	88 82	% %
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	96 92 93	% % %
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	93	%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	94 94	Konten %



		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang <i>dicounter</i>		
52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	91	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4.307	Orang

Nilai Kinerja Anggaran : **87,65** (turunnya NKA terkait penerapan SBK sbg komponen efisiensi dalam penilaian NKA. pada thun 2024, baru ada 2 di DIPA Sekretariat Jenderal dan PHU, yang menggunakan SBK, sehingga pada DIPA lainnya nilai efisiensi jadi tidak optimal)

Kode	Nama Program / Kegiatan	Anggaran
DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	17.602.130.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	9.655.548.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	664.000.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.419.800.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	635.000.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	73.080.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	34.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	849.000.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.427.000.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.260.260.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	468.150.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	274.280.000
2148	Pembinaan Haji	176.564.000
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	665.448.000
DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	34.084.933.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	33.083.413.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	34.520.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	-
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	480.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	487.000.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	43.055.260.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7.864.132.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	32.519.608.000
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	369.576.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	805.000.000



4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	628.704.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	365.240.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	411.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	92.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	33.174.936.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	37.500.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	425.000.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.240.000.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	150.000.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	225.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	8.746.169.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	222.153.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	4.877.912.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	980.357.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.057.695.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	75.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	192.569.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	309.400.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	-
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2.060.072.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	195.000.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	121.109.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	-
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	260.000.000
TOTAL		127.917.259.000



BAB III

CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada masing- masing sasaran kegiatan.

No	Sasaran Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Target Kinerja 2024	Realisasi	Persentase
SK.1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	90	90.00	100.00%
		IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	100	100.00	100.00%
		IKSK.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	487	344.00	70.64%
		IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	2000	6134.00	306.70%
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang <u>ditindaklanjuti</u>	%	100	100	100.00%
		IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	300	636	212.00%



		IKSK.3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa	5	5	100.00%
SK.3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga /Orang	605	485	80.17%
		IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	56	12	21.43%
SK.4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	IKSK.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100	100	100.00%
SK.5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	70	71.00	101.43%
		IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	72	57.00	79.17%
SK.6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	100	98.00	98.00%
SK.7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	70	66.00	94.29%
		IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	80	80.40	100.50%
		IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	647	100.00	15.46%
		IKSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	10	30.00	300.00%



SK.8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan/ Konten	162	176.00	108.64%
SK.9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%
		IKSK.9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	100	100	100.00%



		IKSK.1 0	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	12	12	100.00%
		IKSK.1 1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	1	1	100.00%
SK.10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	100	100	100.00%
		IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	%	1	1.44	144.00%
SK.11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	15	15	100.00%
SK.12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	63	27.00	42.86%
SK.13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Event	13	7.00	53.85%
SK.14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	KUA	5	5.00	100.00%
		IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	18	44.00	244.44%
SK.15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Paket	60	56.00	93.33%



		IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	Buah	525	550.00	104.76%
		IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	70	68.40	97.71%
		IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Layanan	58	89.00	153.45%
		IKSK.5	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	250	363.00	145.20%
		IKSK.6	Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	Orang	20	2.00	10.00%
		IKSK.7	Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Lokasi	1	1.00	100.00%
SK.16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	3	2.00	66.67%
		IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	5	4.00	80.00%
		IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	11200	35972.00	321.18%
		IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	4630	4601.00	99.37%
		IKSK.5	Jumlah penghulu yang dibina	Orang	47	100.00	212.77%
SK.17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Keluarga	215	598.00	278.14%



SK.18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	100	99.96	99.96%
SK.19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	100	99.82	99.82%
		IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0.06	0.00	0.00%
SK.20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	100	100.00	100.00%
SK.21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	95.76	99.88	104.30%
SK.22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	100	96.49	96.49%
SK.23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	IKSK.1	Persentase amil yang dibina	%	89.29	89.29	100.00%
		IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	74.23	90.00	121.24%
SK.24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100	100.00	100.00%
		IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	94.79	95.00	100.22%
		IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	91.6	92.00	100.44%
SK.25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	85	85	100.00%



		IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	100	100	100.00%
		IKSK.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Madrasah	3	3	100.00%
		IKSK.4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Madrasah	16	16	100.00%
SK.26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	IKSK.1	Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	90	90	100.00%
		IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	90	93.65	104.06%
		IKSK.4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Penghargaan	17	34	200.00%
		IKSK.5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	9	11	122.22%
		IKSK.6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	100	100	100.00%
		IKSK.7	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	%	100	100	100.00%
SK.27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	80	80	100.00%
		IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	100	100	100.00%



		IKSK.3	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	85	85	100.00%
		IKSK.4	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	100	100	100.00%
SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	IKSK.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	60	90	150.00%
		IKSK.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	90	84	93.33%
		IKSK.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	90	90	100.00%
		IKSK.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	68	69	101.47%
		IKSK.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	100	100	100.00%
		IKSK.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	75	75	100.00%
SK.29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Siswa	27200	27200	100.00%



		IKSK.2	Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	Siswa	1183	3489	294.93%
		IKSK.3	Persentase siswa madrasah penerima PIP	%	19	19	100.00%
		IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	%	40	64.79	161.98%
		IKSK.5	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	%	5	8.33	166.60%
SK.30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	IKSK.1	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	3	3	100.00%
		IKSK.2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	30	30	100.00%
SK.31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	IKSK.1	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	siswa	11300	11300	100.00%
SK.32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	IKSK.1	Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	40	40	100.00%
		IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	100.00%
		IKSK.3	Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	80	80	100.00%
		IKSK.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	65	77.55	119.31%



SK.33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	IKSK.1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	90	90	100.00%
		IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	92	92	100.00%
		IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	50	60.75	121.50%
SK.34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	IKSK.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	40	40	100.00%
		IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	60	64.49	107.48%
		IKSK.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	98	94	95.92%
		IKSK.4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	%	1	0	0.00%
SK.35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	IKSK.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Madrasah	45	154	342.22%
		IKSK.2	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Sekolah	2	2	100.00%
SK.36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	78	90	115.38%
		IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	58	44	75.86%
		IKSK.3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	1	0.05	5.00%



		IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	3	1	33.33%
SK.37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	IKSK.1	Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100.00%
		IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	100	100	100.00%
		IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	100	100	100.00%
		IKSK.4	Persentase madrasah yang ramah anak.	%	80	90	112.50%
		IKSK.5	Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	50	60	120.00%
SK.38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	IKSK.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	71	71	100.00%
		IKSK.2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah	2	2	100.00%
		IKSK.3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Gugus	60	67	111.67%
SK.39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	100	85	85.00%



		IKSK.2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	100	100	100.00%
		IKSK.3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100.00%
SK.40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	IKSK.1	Persentase rekomendasi izin orang asing	%	90	88	97.78%
SK.41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	100	100	100.00%
		IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	%	100	100	100.00%
		IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	75	75	100.00%
		IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	100	100	100.00%
		IKSK.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	100	100	100.00%
		IKSK.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	75	75	100.00%
		IKSK.7	Persentase data ASN yang diupdate	%	100	100	100.00%
		IKSK.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	75	75	100.00%



SK.42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<i>IKSK.1</i>	<i>Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</i>	<i>Laporan</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	<i>100.00%</i>
		<i>IKSK.2</i>	<i>Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</i>	<i>%</i>	<i>97</i>	<i>100</i>	<i>103.09%</i>
		<i>IKSK.3</i>	<i>Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</i>	<i>%</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>100.00%</i>
		<i>IKSK.4</i>	<i>Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100.00%</i>
SK.43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<i>IKSK.1</i>	<i>Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</i>	<i>%</i>	<i>80</i>	<i>96</i>	<i>120.00%</i>
		<i>IKSK.2</i>	<i>Persentase tanah yang bersertifikat</i>	<i>%</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>103.13%</i>
		<i>IKSK.3</i>	<i>Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN</i>	<i>%</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>100.00%</i>
SK.44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<i>IKSK.1</i>	<i>Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</i>	<i>%</i>	<i>75</i>	<i>63.3</i>	<i>84.40%</i>
		<i>IKSK.2</i>	<i>Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</i>	<i>%</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>98.75%</i>
		<i>IKSK.3</i>	<i>Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</i>	<i>%</i>	<i>80</i>	<i>79.8</i>	<i>99.75%</i>
SK.45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<i>IKSK.1</i>	<i>Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</i>	<i>%</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100.00%</i>
		<i>IKSK.2</i>	<i>Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</i>	<i>Satker</i>	<i>35</i>	<i>32</i>	<i>91.43%</i>



		IKSK.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	35	63	180.00%
SK.46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	95	95	100.00%
		IKSK.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	80	80	100.00%
		IKSK.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	75	70	93.33%
SK.47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	IKSK.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	90	90	100.00%
		IKSK.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	85	80	94.12%
SK.48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	IKSK.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	90	99.29	110.32%
SK.49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	97	108.67	112.03%
		IKSK.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	95	97.21	102.33%
		IKSK.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	95	119.14	125.41%
SK.50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	94	78.4	83.40%
SK.51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	IKSK.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Konten	3900	5625	144.23%
		IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	97	100	103.09%



SK.52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.1	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	95	95	100.00%
SK.53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	IKSK.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	4200	4200	100.00%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama DIY pada tahun 2024 adalah 109.65%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024
	100.40%	109.65%

Dari table di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY mengalami kenaikan sebesar 9,25%



C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta per Sasaran Strategis.

1. SK. 1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Penyuluh agama di setiap agama berperan untuk menyampaikan dakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antar agama, antar suku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agama memiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadap umat beragama. Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensi penyuluh yang meliputi :

- a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, serta kemampuan dalam mengorganisir tugas, kemampuan melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakkan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
- b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja, kemampuan dalam memberikan bimbingan agama dan penyuluhan pembangunan, kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok binaan, pembinaan kepada lembaga keagamaan. Bidang Penaiz Kantor



Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penguatan penyuluh agama islam P3K di lingkungan Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Februari 2024.



SK 1. Kakanwil Dr.Masmin Afif memberi sambutan dan arahan pada pembinaan penyuluh agama islam P3K dilingkungan Kabupaten Sleman

- c. Kompetensi sosial kultural mengacu pada kamus kompetensi jabatan Kementerian Agama terdapat pada Kompetensi inti harmonisasi



keberagaman, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan sehingga diharapkan mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada penata layanan Penyuluh Agama.

2. **SK. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama maka Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melaksanakan kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Silaturahmi dengan tokoh agama/ketua lembaga agama

Agama merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, moderasi beragama diperlukan guna menjaga keharmonisan antara hak beragama dan kewajiban berbangsa dan bernegara, salah satunya di lingkungan instansi pemerintah.

b. Peningkatan Peran Pemuka Lintas Agama

Pada kegiatan ini dilaksanakan deklarasi pemuka lintas agama. Hal ini mengingatkan entitas keragaman Indonesia itu niscaya dan tidak mungkin ditolak. Menurut Menteri Agama pada kesempatan tersebut tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan agama atau kepercayaan lainnya. Indonesia berdiri karena keberagamannya. Pada kesempatan ini Menag juga menyampaikan, ikhtiar deklarasi ini semakin menancapkan pada diri pemuda akan kesadaran tentang keragaman Indonesia dan pentingnya kerukunan. Dalam rangka



peringatan HAB Ke-78 Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan tasyakuran dan doa lintas iman yang di hadiri oleh para tokoh agama pada tanggal 2 Januari 2024.



SK 2. Kakanwil Masmin Afif didampingi Kabag TU Muntolib dan sejumlah tokoh agama serta bank mitra hadir Tasyakuran dan Doa Lintas Iman

c. Ekspansi Penguatan Moderasi Beragama

Kementerian Agama telah mendorong penguatan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama disini dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku selalu mengambil posisi ditengah-tengah,



selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan. Ada 4 indikator moderasi beragama yaitu:

- 1) Cinta Tanah air
- 2) Toleransi yang tinggi
- 3) Anti kekerasan
- 4) Mengakomodasi Budaya Lokal





SK 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta menyelenggarakan Ekspansi Penguatan Moderasi Beragama diikuti Pengurus FKUB DIY, FKUB Kab/Kota, Kesbangpol DIY, Dinas Pariwisata, Pengelola Candi Prambanan, Borobudur, & GPI

d. Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama





SK 2. Kakanwil Masmin Afif membuka Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama bagi Pengurus Pokja MGMP/KKG, Pengawas, Penyuluh Lintas Agama dan ASN

3. **SK. 3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.**

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antarsatu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadisuatu pandangan hidup. Orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antara satu pihak dengan lain dengan baik, mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dengan pemeluk agama lain, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Lebih penting lagi orientasi



dialog adalah koeksistensi ke pro-eksistensi. Koeksistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencari persamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik. Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing-masing melalui misi dakwah. Negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa berdampak sangat negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dialog dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut, dan dialog bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peran tokoh agama DIY dalam dialog antar umat beragama secara signifikan mendukung upaya terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Kanwil Kemenag DIY dalam rangka mencapai tujuan menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa :

- a. Dialog dan Capacity Building Penguatan Moderasi Beragama DIY Tahun 2024



SK 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta melalui Bimas Kristen mengadakan kegiatan Capacity Building Penguatan Moderasi Beragama

- b. Dialog Ormas Keagamaan Islam tingkat Provinsi dalam moderasi beragama untuk Indonesia hebat





SK 3. Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Bidang Pemaszawa menyelenggarakan Dialog Ormas Keagamaan Islam tingkat Provinsi

c. Rakor Pengurus Kelompok Kerja Pengawas Lintas Agama DIY





SK 3. Kabag TU Muntolib didampingi Ketua Tim HDI KUB Nur Ahmad Ghajali buka Rakor Pengurus Kelompok Kerja Pengawas Lintas Agama DIY

4. **SK. 4 Memperkuatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)** Bantuan Operasional FKUB adalah dana APBN yang dituangkan dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY maupun DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang digunakan untuk operasional FKUB pada tahun anggaran 2024. Untuk FKUB Propinsi bantuan operasional senilai Rp 50.000.000. Semua bantuan operasional dapat tersalurkan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional FKUB.
5. **SK. 5 Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**

Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.



- b. Mengadakan forum-forum komunikasi.
- c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.
- d. Rapat Koordinasi Penyuluh Agama Kristen Kanwil Kemenag DIY



SK 5. Kabag Tata Usaha Muntolib membuka Rakor Penyuluh Agama Kristen ASN se-DIY

- e. Rapat kerja wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kanwil Kemenag DIY.



SK 5. Kakanwil Masmin Afif membuka Rakerwil Ikatan Penyuluh Republik Indonesia DIY Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kanwil Kemenag DIY

a. Pembinaan dan Penguatan Fungsi Penyuluh Agama Islam



SK 5. Kakanwil Masmin Afif didampingi Kankemenag Gunungkidul saat memberikan arahan Pembinaan dan Penguatan Fungsi Penyuluh Agama Islam PPPK dan Non PNS terutama berkaitan dengan Penguatan Moderasi Beragama

6. **SK. 6 Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama**

Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluh agama di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 100% yang berwawasan moderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :



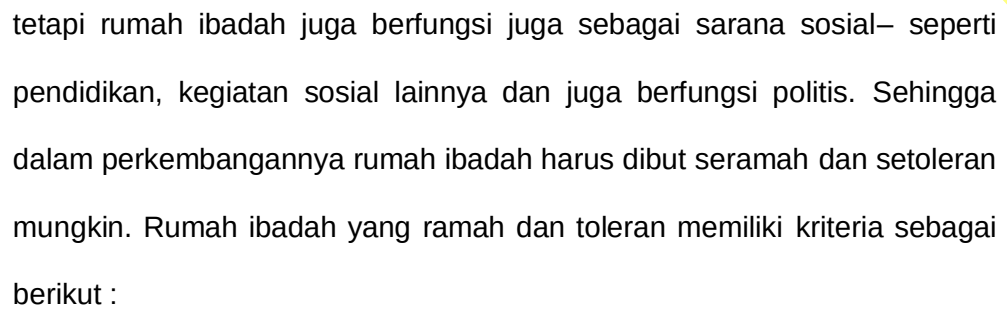
- a. Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
- b. Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos



SK 6. Kakanwil Masmin Afif tampil di Angkringan TVRI Jogja, Amplifikasi Capaian Program Kemenag dengan tema Tahun Toleransi & Peran Kemenag Wujudkan Moderasi Beragama di DIY

- c. Memiliki nilai kemanusiaan
 - d. Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
 - e. Berjiwa NKRI
 - f. Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan
7. **SK. 7 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.**

Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan



-



SK 7. Kakanwil Masmin Afif didampingi Kabid Urais Jauhar Mustofa buka Peningkatan Kualitas Kompetensi SDM Masjid & Rakerda Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

- a. Program Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah (AMPeRA) adalah program tahunan Kementerian Agama (Kemenag) RI. Program ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada masjid-masjid yang menjadi percontohan dan ramah bagi jemaah.



**SELAMAT KEPADA
PARA PEMENANG ANUGERAH
MASJID PERCONTOHAN & RAMAH
(AMPeRa) TAHUN 2024**

Kategori Masjid Raya Percontohan	Kategori Masjid Agung Percontohan	Kategori Masjid Besar Percontohan
Juara 1 Masjid Sabili Muhtadin, Banjarmasin, Kalsel	Juara 1 Masjid Agung Sungailiat, Bangka, Kep. Babel	Juara 1 Masjid Al Ishlah, Kragan, Rembang, Jateng
Juara 2 Masjid Al-Bantani, Serang, Banten	Juara 2 Masjid Ibnu Batutah, Badung, Bali	Juara 2 Masjid Baitul Hamid, Raba, Bima, NTB
Juara 3 Masjid Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Padang, Sumatra Barat	Juara 3 Masjid Al-Baitul Amlen, Jember, Jawa Timur	Juara 3 Masjid Assalaflayyah, Pacet, Cianjur, Jabar

Kategori Masjid Jami Percontohan	Kategori Masjid Bersejarah Percontohan	Kategori Masjid di Tempat Publik Percontohan
Juara 1 Masjid Al-Azka, Nunukan, Kalimantan Utara	Juara 1 Masjid Safinatus Salam, Buleleng, Bali	Juara 1 Masjid Suciati Saliman, Sleman, Yogyakarta
Juara 2 Masjid Haji Keuchik Leumiek, Banda Aceh, Aceh	Juara 2 Masjid Syuhada, Yogyakarta	Juara 2 Masjid Al-Hakim, Padang, Sumatra Barat
Juara 3 Masjid At-Taqwa, Kudus, Jawa Tengah	Juara 3 Masjid Agung Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat	Juara 3 Masjid Al-Husna, Pekanbaru, Riau

bimasislam.kemenag.go.id | Ditjen Binrohan Masyarakat Islam



SK 7. Juara 1 Masjid Suciati Saliman Kategori Masjid ditempat Publik Percontohan dan Juara 2 Masjid Al-Hidayah Kategori Masjid Ramah Dhuafa dan Musafir

8. SK. 08 Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Siaran keagamaan di ruang publik meliputi : siaran keagamaan melalui media TV dan media radio. Dalam mewujudkan sasaran kegiatan ini, maka Kanwil Kementerian Agama DIY melakukan langkah bekerja sama dengan RRI dan ADI TV dalam siaran keagamaan, Radio selain sebagai media penyiaran hiburan dan berita tetapi juga dapat berfungsi sebagai media dakwah, ini merupakan media bagi penyuluh agama guna melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai khalifah dan profesionalis seorang



penyuluh.

9. **SK. 09 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik**

Seluruh mata pelajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.



SK 9. Katim HDI KUB Dr. Nur Ahmad Ghajali, Katim PAI Bidang Pakis Edy Purwanto, Ketua Pokjawas Lintas Agama Ahmad Sholihin & pengurus kunjungi SAMBA, Saung Moderasi Beragama sebagai keunggulan SMAN 1 Bambanglipuro untuk berdialog terkait kerukunan & Moderasi Beragama

10. **SK 10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam**

Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadi indikatornya yakni :

- Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
- Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
- Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk perubahan sosial.
- Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.



- e. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
- f. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual, wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
- g. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
- h. Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalah pendidikan saat ini .
- i. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
- j. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.





SK 10 Rakor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pondok Pesantren DIY, Kegiatan digelar Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan & Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

11. SK. 11 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Dialog lintas agama dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini karena dalam dialog antar agama, antar umat beragama dituntut untuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing sehingga dapat menjembatani perbedaan dan menghindari konflik.





SK 11 Anggota Komisi VIII DPR RI MY Esti Wijayati hadir memberikan Penguatan Moderasi Beragama Dialog Lintas Agama dan Lintas Lembaga Keagamaan

12. **SK.12 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat**

Data jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) terbagi sebagai berikut :

- a. Kakawil melaksanakan visitasi di TK Sari Mekar Banguntapan yang mengajukan ijin pendirian dan ijin operasional menjadi Pratama Widyalyaya Sari Mekar. TK Sari Mekar pada awalnya berada di bawah kementerian pendidikan, namun hasil rapat yayasan menginginkan TK Sari Mekar bernaung di bawah kementerian Agama RI sesuai dengan PMA No.2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan widyalaya.



SK 12 Kakanwil ahmad bahiej didampingi Pembimas Hindu Didik Widya Putra & Ketua Tim Perencanaan dan Ortala Anas Effendi kunjungi Pratama Widyalyaya Sakti Mekar Banguntapan, Bantul

- b. Kakanwil dan Pembimas Hindu visitasi terhadap pengajuan pendirian dan ijin operasional pratama widyalaya kondho bumi yg beralamat di kasuran, margodadi, seyegan, sleman, DI Yogyakarta.



SK 12 Kakanwil ahmad bahiej didampingi Pembimas Hindu Didik Widya Putra & Ketua Tim Perencanaan dan Ortala Anas Effendi kunjungi Pratama Widyalya Kondo Bumi Seyegan, Sleman

13. SK 13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Data Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll) adalah sebagai berikut :

- a. Pada ajang MTQ XXX Tingkat Nasional Tahun 2024, DIY akan



mengirimkan 22 peserta dari 9 cabang, Adapun 12 cabang lomba MTQ Nasional 2024 adalah Tilawah dewasa putra 2 orang, Tilawah dewasa putri 2 orang, Tahfidz 10 juz putra 1 orang, Tahfidz 30 juz putra 1 orang, Fahm Al Qur'an putra 6 orang, Syarh Al Qur'an putri 6 orang, Tafsir Al Qur'an Bahasa Inggris putra 1 orang, Tafsir Al Qur'an Bahasa Indonesia putri 1 orang, seni kaligrafi putri 1 orang.



SK 13 Khafilah dari perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta MTQ Nasional XXX Samarinda, Kalimantan Timur

- b. Pada Ajang Pesparawi Ada 5 cabang lomba yang dilaksanakan diantaranya 1. Lomba Solo Anak 7-9 Tahun (6 orang) 2. Lomba Solo Anak 10-15 Tahun (21 orang) 3. Lomba Solo Remaja Putri 16-23 Tahun (13 orang) 4. Lomba Solo Remaja Putra 16-23 Tahun (8 orang) 5. Lomba Vocal Grup (5 regu).



SK 13 Mewakili Kakanwil Ahmad Bahiej, Kabag Tata Usaha Muntolib menyampaikan sambutan Pembukaan Lomba Pesparawi DIY 2024 dengan tema "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu (Mazmur 34:2a) di GKI Gejayan

14. SK.14 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama yang dilakukan per lokus serta melaksanakan pembinaan manajemen perpustakaan rumah ibadah.

15. SK.15 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Pemerintah melalui Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan bidang agama hadir untuk masyarakat. Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menjadi penting, mengingat sensitifitas isu dalam bidang agama seperti dua mata pisau yang dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan sarana prasarana ibadah (mukena / sajadah / karpet /



tikar / sound / mimbar) pada masjid/musholla.

b. Bantuan sarpras ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar) masjid mushalla.

a. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah sehat.

b. pemberian bantuan sarana prasaran rumah ibadah.

c. Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan peribadatan.

16. **K.16 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk**

Terdapat beberapa hal yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain sebagai berikut :

a. Pada tahun 2024, terdapat 2 KUA yang direvitalisasi yaitu : KUA Kapanewon Pajangan dan Kemantren Pakualaman;



SK 16 Kakanwil Masmin Afif didampingi Plh. Kabid Urais Nurhuda dan Kakankemenag Gunungkidul Sa'ban



Nuroni pimpin Rapat Evaluasi Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Playen, Gunungkidul

- b. Pada Tahun 2024, KUA yang ditingkatkan sarana dan prasaranya adalah : Kua Playen, KUA Srandakan, KUA Mantrijeron dan KUA Jetis;
- c. Penghulu yang kompeten dengan kompetensi sebagai berikut :
 - 1) Kompetensi manajerial, hal ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Hal ini berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun. Selain itu memiliki kemampuan dalam mengorganisir tugas, melakukan pengkoordinasian dan mampu menggerakkan semua potensi yang ada serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
 - 2) Kompetensi Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dan maknanya, termasuk kemampuan membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan fiqh munakahat dan permasalahan munakahat kontemporer, serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa arab dan bahasa Inggris.
 - 3) Ketiga adalah Kompetensi Sosial Kultural, kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.



- d. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas khusus pra nikah dilaksanakan secara klasikal di KUA. Kota 2.938 orang, Kab. Bantul 9.858 orang, Kab. Kulonprogo 4.220 orang, Gunungkidul 8.146 orang, Kab. Sleman 10.810 orang.
- e. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah dilaksanakan di MAN 5 Sleman, MAN I KP, MAN 1 Bantul, MAN 3 KP, MA Muh. Al Manar KP, MA Muallimaat Muh Yk, MAN 4 Btl, MA Ma'arif Darussholihin, MA Nurul Ummah, MA Al Ma'had An Nur, MAN 1 Yogyakarta, MAN 3 Sleman, MAN 1 Sleman MA Mu'allimin. MA Darul Qur'an. MA Al Jauhar, MA Daarul Ulum Sinar Melati, MA Muhammadiyah 1 Yk, MA Nurul Qur'an Patuk,GK, MAN 1 Gunungkidul, MA YAPPI Gubukrubuh, playen, Gunungkidul, MA Ma'arif Nurul Haromain, Sentolo, KP. MA Ali Maksum, Krapyak, MA Madania Bantul, MA Tahfidz El Muna Q, MA Anwar Futuhiyyah, MAN 2 Kulon Progo, MA Nur Iman Sleman, MAN 2 Yogyakarta, MAN 2 Sleman, SMA 1 Sewon Bantul, SMK Pelita Buana Sewon Bantul, Remaja Masjid Se - Kelurahan Bangunharjo Sewon Bantul, SMAN I Pajangan Bantul.

17. SK.17 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya adalah keluarga dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Islam
 - 1) Piloting program pusaka sakinah
 - 2) Keluarga peserta aktif/akseptor Pusaka Sakinah



b. Kristen

- 1) Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani
- 2) Keluarga Kristen Suami Istri (Kriteria ini timbul saat evaluasi efektifitas pelayanan bimbingan keluarga 2019 yg mengikuti hanya suami atau istri saja, padahal keluarga harusnya terkait kedua belah pihak)

c. Katolik

- 1) Keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia melalui penyuluh
- 2) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga bahagia

d. Hindu

- 1) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga sukinah
- 2) Semua anggota keluarga beragama Hindu
- 3) Kepala keluarga memiliki pekerjaan/ usaha yang menghasilkan artha dan mampu mensejahterakan keluarga
- 4) Usia perkawinan minimal 5 tahun

e. Budha

- 1) keluarga yang memperoleh bimbingan pembinaan pembentukan keluarga hatta sukhaya melalui anggaran DIPA
- 2) pembinaan keluarga hatta sukhaya melalui penyuluh dan penyiar agama

Data untuk jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hatta sukhaya adalah sebagai berikut :



- a) Pembinaan Keluarga Sakinah sejumlah 470 keluarga yang dilaksanakan KUA Gedong Tengen 36 orang, KUA Tegalrejo 70 orang , KUA Umbulharjo 94 orang, KUA Kota Gede 36 orang, KUA Sewon 18 orang, KUA Depok 52 orang, KUA Semin 8 orang, KUA Naggulan 10 orang, KUA Mlati 6 orang, KUA Pengasih 10 orang, KUA Galur 48 orang, KUA Pundong 6 orang, KUA Bantul 10 orang, KUA Prambanan 4 orang, KUA Sentolo 10 orang, KUA tegalrejo 20 orang, KUA Wonosari 24 orang, KUA Playen 6 orang, KUA Karangmojo 2 orang;
- b) Pembinaan Keluarga Kristiani sejumlah 40 keluarga;
- c) Pembinaan Keluarga Bahagia sejumlah 32 keluarga;
- d) Pembinaan Keluarga Sukinah sejumlah 30 keluarga;
- e) Pembinaan Hitta Sukkhaya sejumlah 26 keluarga.

18. SK. 18 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :



- a. Melaksanakan pembinaan baik dengan tatap muka atau online, atau melalui media sosial.



SK 18 Ketua PW FKAPHI DIY Tejo Katon menjadi narsum Manasik Haji Online yang digelar Bidang PHU Kemenag DIY Dengan tema: Menjaga Kesehatan (Kebugaran) Jamaah Haji dan Tips Tetap Bugar selama Penerbangan

- b. Kanwil / Kemenag Kab/Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan, baik ke kantor PPIU, di bandara keberangkatan, dan menu aplikasi Siskohat



SK 18 Kabid PHU Aidi Johansyah dan Katim I Agus Nur Budiarno hadir peresmian kantor cabang Saudia Airlines Indonesia di Yogyakarta

19. SK. 19 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji



Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki SOP pelayanan
- b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
- c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
- d. Memiliki alat rekam biometric
- e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

20. **SK. 20 Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji**

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asrama Haji).

21. **SK 21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**

Calon jamaah haji yang mengikuti manasik haji dengan kriteria :

- a. Mengikuti manasik haji KUA dan Kab/Kota berbasis anggaran PAOH
- b. Mengikuti manasik di KBIHU
- c. Mengikuti Jum'at Manasik di KUA dalam program Jum'at manasik



SK 18 Kakanwil Ahmad Bahiej menyampaikan sambutan pada Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Angkatan XV.

22. SK. 22 Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.

Peningkatan pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dapat ditingkatkan dengan :

- a. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun
- b. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimoterik, dan jaringan yang



memadai

- c. Memiliki SDM yang menangani siskohat

23. **SK 23. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan danazakat dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Amil Zakat yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
- b. Lembaga Zakat merupakan lembaga yang sudah Terdaftar
- c. Bantuan Operasional BAZNAS Provinsi Data untuk amil zakat dan lembaga zakat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase amil yang dibina	%	89.24%
Jumlah yang dibina		655
	Kanwil	1
	Kota Yk	127
	Sleman	186
	Bantul	96
	Kulonprogo	180
	Gunungkidul	65
Jumlah Total amil zakat		734
	Kanwil	1
	Kota Yk	148
	Sleman	216
	Bantul	104
	Kulonprogo	195
	Gunungkidul	70



2. Persentase lembaga zakat yang dibina	%	90.05%
Jumlah yang dibina		661
	Kanwil	1
	Kota Yk	135
	Sleman	188
	Bantul	96
	Kulonprogo	184
	Gunungkidul	57
Jumlah Total Lembaga Zakat		734
	Kanwil	1
	Kota Yk	148
	Sleman	216
	Bantul	104
	Kulonprogo	195
	Gunungkidul	70



SK 23a Mewakili Kakanwil Masm in Afif, Kabid Penais Zawa Nurhuda membuka Bimbingan Teknis Akreditasi dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat Tahun 2024 dan Penyerahan Penghargaan Pengelolaan ZIS-DSKL



24. **SK 24 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**

Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan kriteria sebagaiberikut :

- Nazhir yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
- Bantuan Operasional BWI Provinsi
- Lembaga Wakaf yang terdata tanah wakafnya (Sensus)

1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	100%
Jumlah yang dibina		14
	Kanwil	9
	Kota Yk	1
	Sleman	1
	Bantul	1
	Kulonprogo	1
	Gunungkidul	1
Jumlah Total Lembaga Wakaf		14
	Kanwil	9
	Kota Yk	1
	Sleman	1
	Bantul	1
	Kulonprogo	1
	Gunungkidul	1
2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Akta	100%
Jumlah akta ikrar wakaf diterbitkan		358
	Kota Yk	20
	Sleman	14
	Bantul	138
	Kulonprogo	127
	Gunungkidul	59



Jumlah Total Permohonan Ikrar Wakaf		358
	Kota Yk	20
	Sleman	14
	Bantul	138
	Kulonprogo	127
	Gunungkidul	59
3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Akta	90%
Jumlah tanah wakaf yang sudah sertifikat		11421
	Kota Yk	974
	Sleman	3803
	Bantul	2330
	Kulonprogo	2274
	Gunungkidul	2040
Jumlah Total tanah wakaf (Asumsi)		12693
	Kota Yk	996
	Sleman	4056
	Bantul	3214
	Kulonprogo	2291
	Gunungkidul	2136



SK 24 Kakanwil Ahmad Bahiej beri arahan saat Rakordasi Rencana Aksi Kegiatan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia DIY

25. **SK 25. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.**

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated instruction). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru.

Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai berikut :



- a. Memiliki prosedur yang sistematis untuk memodifikasi perilaku siswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahan perilaku positif siswa.
- c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
- d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
- e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belajar



SK 25 Kabag Tata Usaha Muntolib didampingi Pembimas Katolik Kristoforus Sinselius hadir memberikan materi Pembinaan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik Tingkat Dasar (Angkatan II).

26. **SK 26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dari 7.293 baru 3.088 yang telah memperoleh



TPG di Tahun 2024 karena terkendala pada masih terbatasnya program pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan mutu kompetensi dan sertifikasi guru madrasah;

- b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan penyaluran insentif ustadz/ustadzah pada bulan Juni 2024 dengan total jumlah penerima 322 orang;
- c. Bidang Pakis melaksanakan Koordinasi Pembayaran TPG dengan Kankemenag Kab/Kota , melakukan Verifikasi dan Validasi Kelayakan Pembayaran TPG Guru PAI Non PNS, melakukan pendistribusian/pembayaran TPG Guru PAI Non PNS, dan menyusun Data Guru PAI yang dinilai kinerjanya dan yang layak menerima TPG. Untuk triwulan 1 dari jumlah guru PAI yang berhak menerima TPG (499 Orang) terdapat 5 Guru PAI yang tidak layak menerima TPG karena kurang jam dan/atau belum bisa cetak SKMT. Pada Triwulan 2 dari jumlah guru PAI yang berhak menerima TPG (499 orang) semua layak menerima TPG, pada Triwulan III dari jumlah guru PAI yang berhak menerima TPG (499 orang), terdapat 3 guru PAI yang tidak layak menerima TPG. Pada triwulan IV dari jumlah guru PAI yang berhak menerima TPG (499 Orang) semua layak menerima TPG.
- d. Jenis asesmen yang dimaksud adalah asesmen yang diselenggarakan untuk siswa madrasah (Asesmen Akhir Madrasah,/Asesmen Sumatif Madrasah/ ASPD/AKMI/ANBK/ABM) . Untuk PDF, SPM dan PKPPS asesmennya berupa ASPD/ANBK/Ujian Kesetaraan Nasional/Uji



Kesetaraan/Imtihan Wathoni (didapatkan dari jumlah jenis asesmen yang diselenggarakan untuk siswa madrasah,) Pada TWII baru terlaksana asesment bakat minat MTS dan asesment madrasah jenjang MA MTS dan MI. Untuk AKMI pelaksanaan di TW III sudah terlaksana dan sementara ANBK di TW II dan III sudah terlaksana jenjang MA dan MTS. pada TW IV ada Jenjang MI dan ABM Jenjang MA.

- e. Siswa madrasah yang mengikuti Asesmen Kompetensi Madrasah semua jenjang (Diukur dengan menghitung/mendata jumlah siswa yang menjadi target asesmen dan mengikuti asesmen). Pada TWII baru terlaksana asesment bakat minat MTS dan asesment madrasah jenjang MA MTS dan MI, ANBK jenjang MA MTS MI. Untuk AKMI pelaksanaan di TW III sdh terlaksana, sementara ANBK jenjang MA dan MTS sudah terlaksana, dan pada Jenjang MI dilaksanakan di bulan November. ABM MA di bulan Oktober dan November 2024.
- f. Bidang Pakis menyusun rekapitulasi data peserta IW di PP Al Mubarak pada triwulan 1 dan rekapitulasi data peserta UK, UKN, dan ASPD pada triwulan 2.





SK 26 Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej hadir membuka Kompetisi Sains Madrasah Tingkat DIY

27. **SK 27. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran**

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upaya strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seluruh madrasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama DIY telah memanfaatkan TIK dalam proses pembelajarannya.

28. **SK. 28 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan**



SK.28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	%		
IKSK.1.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana			
	Raudhatul Athfal	Kota	12	69.77%
		Sleman	70	
		Bantul	46	
		Kulon progo	32	
		Gunungkidul	98	
	Jumlah RA	se-DIY	258	
	Jumlah RA yg memenuhi SPM sarpras	se-DIY	180	
	Pratama Widya Pasraman	Kota	0	50.00%
		Sleman	0	
		Bantul	1	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	1	
	Jumlah Pratama Widya Pasraman	se-DIY	2	
	Jumlah Pratama Widya Pasraman yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	1	
	Taman Seminari	Kota	0	0.00%
		Sleman	0	
		Bantul	0	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah Taman Seminari	se-DIY	0	
	Jumlah Taman Seminari yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	0	
	Nava Dhammasekha	Kota	0	0.00%



		Sleman	0	
		Bantul	0	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah Nava Dhammasekha	se-DIY	0	
	Jumlah Nava Dhammasekha yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	0	
IKSK.1.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	Madrasah Ibtidaiyah	Kota	4	77.56%
		Sleman	44	
		Bantul	42	
		Kulon progo	32	
		Gunungkidul	83	
	Jumlah MI	se-DIY	205	
	Jumlah MI yg memenuhi SPM sarpras	se-DIY	159	
	ULA	Kota	0	100.00%
		Sleman	0	
		Bantul	1	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah PPS ULA	se-DIY	1	
	Jumlah PPS ULA yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	1	
	SDTK	Kota	0	0.00%
		Sleman	0	
		Bantul	0	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah SDTK	se-DIY	0	



	Jumlah SDK yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	0	
	Adhi Widya Pasraman	Kota	1	16.67%
		Sleman	1	
		Bantul	1	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	3	
	Jumlah Adhi Widya Pasraman	se-DIY	6	
	Jumlah Adhi Widya Pasraman yg memenuhi SPM sarpras	se-DIY	1	
IKSK.1.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	Madrasah Tsanawiyah	Kota	7	89.76%
		Sleman	42	
		Bantul	31	
		Kulon progo	16	
		Gunungkidul	31	
	Jumlah MTS	se-DIY	127	
	Jumlah MTS yg memenuhi SPM sarpras	se-DIY	114	
	WUSTHA	Kota	1	93.33%
		Sleman	5	
		Bantul	7	
		Kulon progo	1	
		Gunungkidul	1	
	Jumlah PPS Wustha	se-DIY	15	
	Jumlah PPS Wustha yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	14	
	SMPTK	Kota	0	0.00%
		Sleman	0	
		Bantul	0	



		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah SMPTK	se-DIY	0	
	Jumlah SMPTK yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	0	
	Madyama Widya Pasraman	Kota	1	16.67%
		Sleman	1	
		Bantul	1	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	3	
	Jumlah Madyama Widya Pasraman	se-DIY	6	
	Jumlah Madyama Widya Pasraman yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	1	
	IKSK.1.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	
	Madrasah Aliyah	Kota	7	70.00%

		Sleman	31	
		Bantul	22	
		Kulon progo	8	
		Gunungkidul	12	
	Jumlah MA	se-DIY	80	
	Jumlah MA yg memenuhi SPM sarpras	se-DIY	56	
	PPS Ulya	Kota	0	71.43%
		Sleman	4	
		Bantul	3	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah PPS Ulya	se-DIY	7	
	Jumlah PPS Ulya yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	5	
	SMTK/SMK	Kota	0	0.00%



		Sleman	0	
		Bantul	0	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah SMTK/SMAK	se-DIY	0	
	Jumlah SMTK/SMAK yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	0	
	Utama Widya Pasraman	Kota	1	16.67%
		Sleman	1	
		Bantul	1	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	3	
	Jumlah Utama Widya Pasraman	se-DIY	6	
	Jumlah Utama Widya Pasraman yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	1	
IKSK.1.5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%		
	PDF/Pendidikan Muadalah	Kota	0	100.00%
		Sleman	3	
		Bantul	2	
		Kulon progo	0	
		Gunungkidul	0	
	Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah	se-DIY	5	
	Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	5	
IKSK.1.7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%		
	Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal	Kota	1	16.67%
		Sleman	1	



		Bantul	0	
		Kulon progo	2	
		Gunungkidul	2	
	Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal	se-DIY	6	
	Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yg memenuhi SPM Sarpras	se-DIY	1	



SK 28 Kabag Tata Usaha Muntolib didampingi Kabid Pendidikan Madrasah Abd. Suud, Kakankemenag Kulon Progo Wahib Jamil, & jajaran Bidang Penmad melaksanakan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru MTsN 2 Kulon Progo

29. **SK 29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**

- Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah Tahun 2024 terdapat 27.200 siswa madrasah negeri yang mendapat BOS, pada BOS Swasta langsung dana alokasi langsung dari Pusat. BOS sebagai tambahan dana operasional untuk dukungan pembelajaran dan operasional madrasah;
- Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah



adalah sebanyak 3.489 siswa melalui Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan pembinaan/pendampingan updating data santri di aplikasi EMIS, karena salah satu persyaratan mengajukan BOS adalah santri ybs sudah terdaftar di EMIS. Selain melakukan pembinaan terkait EMIS juga melakukan pemantauan terkait penyaluran Dana BOS. Pada triwulan I dan II telah dilakukan proses pendataan dan telah dilaksanakan pembinaan/pendampingan updating data santri di aplikasi EMIS. Pada triwulan III telah dilakukan monitoring terhadap penyaluran BOS.3.

- c. Persentase siswa madrasah penerima PIP dari 81.690 siswa hanya 33.401 usulan siswa yang mendapatkan PIP karena masih terbatasnya dukungan dana dari Pusat terhadap program PIP.
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP Bidang Pakis melalui Seksi Pondok Pesantren melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis BOP dan Pendampingan Pelaporan BOP. Pada Triwulan I dilakukan pemberitahuan BOP ke lembaga, proses verifikasi dan validasi data calon penerima BOP, dan penyusunan SK penetapan penerima BOP dan sosialisasi Juknis kepada penerima BOP. Pada Triwulan II, BOP yang sudah didistribusikan adalah BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam untuk 133 lembaga. Pada triwulan III didistribusikan BOP PESANTREN : 25 lembaga, LPQ(Lembaga Pendidikan Alqur'an) : 92 lembaga, MDT(Madrasah Diniyah Takmiliyah) : 17 lembaga, PKPPS(Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) : 4 lembaga, PDF (Pendidikan Diniyah



Formal) : 3 lembaga, SPM (Satuan Pendidikan Muadalah) : 2 lembaga.

30. **SK. 30 Meningkatnya kualitas penanganan ATS**

- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi
Berdasarkan SK Kanwil No 65 A Tahun 2022, terdapat 27 madrasah inklusi;
- b. Persentase ATS yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan (PPK) di Pesantren Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan Kegiatan pemetaan Anak Tidak Sekolah yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dan sosialisasi program pendidikan kesetaraan. pada Triwulan I telah dilaksanakan pemetaan terhadap ATS yaitu ada di 5 pondok pesantren di Sleman sebanyak 100 santri dan pada triwulan II telah dilakukan pemetaan terhadap ATS di 1 pondok pesantren di Kulonprogo sebanyak 105 santri. Selanjutnya pada Tw III sudah dilaksanakan sosialisasi program pendidikan kesetaraan

31. **SK 31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah**

Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP Jumlah siswa RA tidak mencapai pagu awal penetapan BOP karena faktor Pandemi dan pembatasan belajar di sekolah membuat orangtua siswa tidak memasukkan anaknya ke RA sehingga siswa RA, menjadi turun jumlah siswa RA nya.

32. **SK 32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Persentase guru PAI yang lulus sertifikasi dari 7.142 jumlah total guru



baru 1.223 guru yang telah memperoleh TPG dan persentase guru PAI dari jumlah guru 3.331 yang sudah sertifikasi 1.638 guru karena terkendala pada masih terbatasnya program pelatihan dan pendidikan untuk peningkatan mutu kompetensi dan sertifikasi guru madrasah/PAI.

2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadallah yang dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebanyak 63 guru MTsN 7 Bantul mengikuti diseminasi penyusunan soal Asesmen.



SK 32 Kabag Tata Usaha Muntolib hadir memberikan Pembinaan pada Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTsN 7 Bantul



3. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG Bidang Pakis melalui Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan SI PAKIS melaksanakan pendataan ustadz/ustadzah dan melaksanakan Kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan. Pada triwulan I dan II telah dilaksanakan pendataan ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan dan persiapan kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan. Kegiatan Penguatan KKG/MGMP kepada ustadz/ustadzah pada Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/Kesetaraan dilaksanakan pada triwulan III
33. **SK 33. Terpenuhiya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal.**

Kualifikasi dan kompetensi minimal guru harus memiliki ijazah D4 atau S1, dan mempunyai sertifikat pendidik.
34. **SK 34 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.**
 - a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG dari 3.088 pendaftar PPG hanya 4.205 orang yang dipanggil untuk mengikuti PPG.
 - b. Bidang Pakis melaksanakan kerjasama lintas sektoral ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.Yogyakarta dan pemda/pemkot melalui Kankemenag Kab/Kota terkait pembiayaan PPG Guru PAI yang bersumber dari APBD serta kerjasama dengan BAZNAS Provinsi



dan Kabupaten/Kota terkait pembiayaan PPG Guru PAI dari BAZNAS.

Bidang Pakis juga melaksanakan penyusunan rekap data guru pendidikan agama islam yang mengikuti PPG pada triwulan 4. Jumlah guru PAI yang sudah mengikuti seleksi akademik atau pretest PPG sebanyak 2.915. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah guru PAI yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 1.708 orang dan guru PAI yang mengikuti PPG tahun 2024 sebanyak 172 sehingga total guru PAI yang telah mengikuti PPG s.d. tahun 2024 adalah 1.880 orang. Sehingga presentasi yang sudah mengikuti PPG adalah sebesar 64,49%.

- c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru.

35. **SK 35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**

Fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus untuk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi madrasah yang akan mengajukan akreditasi, serta pendampingan pada madrasah



yang akan diakreditasi/supervise.



SK 35 Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah lakukan visitasi 23 – 24 Oktober 2024 dalam rangka akreditasi di Sekolah Dasar Teologi Kristen Jogja Patriae Academy Yogyakarta didampingi Bimas Kemenag DIY dan Pengawas Guru PAK Kankemenag Kabupaten Sleman

36. SK 36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur mutu baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan suasana pembelajaran serta kultur akademik. Cara pandang untuk selalu unggul, tata kelola madrasah yang dinamis, kurikulum pembelajaran yang kreatif dan inovatif, para guru yang mempunyai karakter dan kapasitas di atas rata-rata madrasah lain dan penciptaan lingkungan madrasah yang mendukung untuk fastabiqul khairat. Pemimpin Madrasah, guru dan karyawan sama-sama berkomitmen menciptakan budaya mutu untuk mendukung kemajuan madrasah untuk mengantarkan lembaganya meraih kesuksesan.

37. SK 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.



Lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dapat ditempuh dengan implementasi pendidikan karakter di madrasah/sekolah.

Secara umum fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik.
- b. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.
- c. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.

Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong.

38. SK 38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan.

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar Kepramukaan dan metode pendidikan Kepramukaan.



Sasaran akhir dari Pendidikan Kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.



SK 38 Kakanwil Ahmad Bahiej didampingi Kabid Pendidikan Madrasah Abd. Suud hadir dalam Kemah Pramuka Madrasah Nasional (KPMN) tahun 2024 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur

39. **SK 39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang agama, Kementerian Agama pasti terlibat dalam berbagai bentuk produk hukum yang dikeluarkan. Untuk level Kementerian Agama pusat produk hukum bisa dikeluarkan dalam bentuk Peraturan



Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama. Adapun untuk level kantor wilayah provinsi produk hukum dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan kepala kantor dan surat-surat lainnya.

Dalam sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Bantuan Hukum, terdapat empat indikator yang harus dipenuhi targetnya, yakni:

1. Presentasi Produk Hukum yang diterbitkan selama Tahun 2024 telah menerbitkan 657 Produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

No	Produk Hukum	Jumlah
1	MoU	9
2	PKS	2
3	SK	646

2. Persentasi Kasus Hukum yang terselesaikan ada 2 (dua) perkara hukum yang telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara register No 31/Pdt.G/2024/PN YYK diputus tgl 11 Juni 2024
- 2) Perkara Banding Putusan sebagaimana tersebut pada No 1 dan telah diputus dengan Putusan Nomor 73/PDT/2024/PT YYK

3. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan telah terlaksana 2 (dua) kegiatan Pembinaan Hukum:

1. Pembinaan hukum dengan judul “Berantas Tuntas Judi Online dan Pengukuhan Tim Penegakan Disiplin Pegawai” di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama D.I.Yogyakarta Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan selama 1 hari pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 bertempat di Aula MAN 1 Yogyakarta yang dilaksanakan secara daring dan Luring sekaligus Launching Layanan Aplikasi SAE.
2. Bimtek Penggunaan Aplikasi SAE bagi Admin Kabupaten Kota di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Kamis, 26 September 2024, bertempat di ruang Rapat PTSP.





SK 39 Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama RI Imam Syaukani S.Ag., M.H. memberikan bimtek dan pelatihan Legal Drafting For Beginners Turut hadir Kakanwil Dr. Ahmad Bahiej dan Kabag Tata Usaha Muntolib.

40. **SK 40. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri**

Salah satu tugas Kementerian Agama yang terkait dengan hubungan luar negeri adalah terkait perizinan tinggal orang asing di Indonesia yang terkait dengan persoalan agama. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing Di Bidang Agama. PMA 3/2023 ini merupakan regulasi baru yang memperbarui peraturan yang lama yakni Peraturan Menteri Agama nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama.

Orang asing dalam bidang agama sebagaimana dijelaskan oleh PMA 3/2023 terdiri dari beberapa kategori antara lain a) Tenaga Kerja Asing yang meliputi; rohaniwan, pengajar, dan tenaga ahli; b) mahasiswa/mahasantri; dan c) pelajar/santri.

Tugas pemberian rekomendasi izin orang asing tersebut juga menjadi tugas yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah



Istimewa Yogyakarta. Persentase rekomendasi izin orang asing selama Tahun 2024 telah menerbitkan 75 Persetujuan Rekomendasi Orang Asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen Orang Asing	Jumlah
1	ITAP	8
2	RPTKA	15
3	RPTKA Non DKPTKA	17
4	IMTA	7
5	ITAS	16
6	VISA	12

41. SK 41. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Apatur sipil negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai salah satu unsur ASN, pegawai negeri sipil (PNS) bertugas melayani kepentingan publik dalam merealisasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan kualitas PNS itu sendiri.

Maka dari itu, manajemen PNS perlu diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas dapat berdaya guna, dan hasil guna. Manajemen PNS merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, derajat profesioanalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan,



dan pemberhentian PNS.

Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, professional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ASN dengan menerapkan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, professional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



SK 41 Kakanwil Ahmad Bahiej hadir memberikan materi Penerapan Fungsi dan Tugas ASN di Tempat Kerja pada Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang digelar Balai Diklat Keagamaan Semarang

42. **SK 42. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.**

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :



- a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
- b. Menjaga stabilitas ekonomi
- c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
- d. Mendorong Re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama DIY selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama DIY sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.



SK 42 Kabag Tata Usaha Muntolib didampingi Kakankemenag Bantul Ahmad Shidqi dan Kasubbag TU Aminuddin membuka dan memberi arahan pada FGD Pengelola Keuangan

43. **SK. 43 Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel**

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,



pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:

- a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
- b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai
- c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar





SK 43 Kakanwil Ahmad Bahiej didampingi Kabag Tata Usaha membuka dan beri arahan pada kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Pada Aplikasi SIMAN V.2

44. **SK. 44 Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**

- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis Kanwil Kementerian Agama sudah melaksanakan penetapan dan evaluasi untuk 1 kanwil kemenag DIY, 5 kankemenag Kab/kota, dan 15 madrasah.
- b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi Kanwil Kementerian Agama DIY sudah melakukan evaluasi atas laporan kinerja yang disusun satuan kerja sejumlah 56 satker, antara lain : Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota dan madrasah negeri
- c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Penyelesaian TLHP sudah ditindaklanjuti.

45. **SK 45. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Reformasi**

Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah



untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang dengan profesional karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran **Grand design** Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

- a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*.
- c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
- d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

46. **SK 46. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**

- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas Sesuai dengan peraturan dirjen perbendaharaan nomor 4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian kinerja anggaran sesuai dengan pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa indikator kinerja pada pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan



pelaksanaan anggaran terdiri dari revisi DIPA, defisiensi halaman 3 DIPA dan pagu minus

- b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bahwa Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sedang Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan dimasa yang akan datang baik output, outcome dan impact.

47. **SK 47. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran**

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama DIY berpedoman pada KMA no 94 tahun 2021.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana



pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

48. **SK 48. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor**

Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Tahun 2024 terdiri atas:



- a. Pemeliharaan gedung Kantor, sisa Pagu untuk kebutuhan pembayaran Cleaning Service dan Membayar Pengharum ruangan s.d Desember 2024
 - b. Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
 - d. Pagu Anggaran akan dipergunakan untuk pembayaran perencanaan yang terbagi 2 Termin, termin I 80 % (Februari) dan termin II 20% (April) setelah kontrak dengan pelaksana. Tahap kedua digunakan untuk pembayaran pengawasan yang terdiri dari termin I 90% (Agustus) dan 10% (Agustus) setelah fisik selesai (jaminan pengawasan). Sisa Pagu Anggaran digunakan untuk pembayaran uang muka awal 30% (April) dimulainya kontrak awal (dua minggu setelah awal kontrak), termin I 50% (Juli) setelah fisik mencapai 55% dari pelaksana dikurangi nilai 30% (dari uang muka awal), termin II 45% (Agustus) setelah BAST fisik. Retensi 5% (Agustus) untuk jaminan pemeliharaan dan Anggaran Administrasi Pengelolaan dibayarkan setelah BAST (Desember 2024).
49. **SK. 49 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa.**
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu pemanfaatan media elektronik untuk penyampaian tindaklanjuti surat masuk (Aplikasi SANTRI) meningkatkan tindaklanjuti penyelesaian surat dengan tepat waktu sejumlah 6.520 surat
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 7.777 naskah dinas pada kanwil telah dibuat secara elektronik menggunakan Tanda



Tangan Elektronik dan sebagian besar surat/dokumen Kanwil dikirim melalui media elektronik, termasuk hasil layanan yang bersifat online

- c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen seluruh arsip surat masuk dan keluar dan produk hukum Kanwil (sejumlah 14.297 arsip) telah di simpan dalam bentuk softcopy (pdf) dalam aplikasi SANTRI dan telah dilaksanakan alih media bagi arsip-arsip yang diciptakan oleh unit kerja.

50. **SK 50 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga**

Berdasar data IKM Triwulan 4 menunjukkan 91 responden yang digunakan sebagai sampel pelayanan tamu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dan Dari data Nilai IKM triwulan 4 menunjukkan Nilai IKM 94,22 % jadi bisa diambil kesimpulan bahwa kepuasan layanan tamu masuk kategori Sangat Baik

51. **SK 51. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**

- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi jumlah pemberitaan Kanwil Kemenag DIY dan kiriman berita satker sesuai melebihi target dengan capaian 5.625 konten.
- b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter* selalu melakukan counter pemberitaan negatif.

52. **SK 52 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**

Sesuai dengan KMA no 440 tahun 2018 tentang pengelolaan data dan informasi pada kementerian Agama maka kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta berusaha menampilkan data yang akurat, relevan, mudah



diakses, tepat waktu, up to date. Syarat-syarat informasi yang baik antara lain, adalah :

- a. Ketersediaan availability. Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- b. Mudah dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- c. Relevan. Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
- d. Bermanfaat. Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
- e. Tepat waktu. Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah.
- f. Keandalan Reliability. Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
- g. Akurat. Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya;
- h. Konsisten. Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

53. **SK 53 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan**

Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY adalah 4.270 pegawai

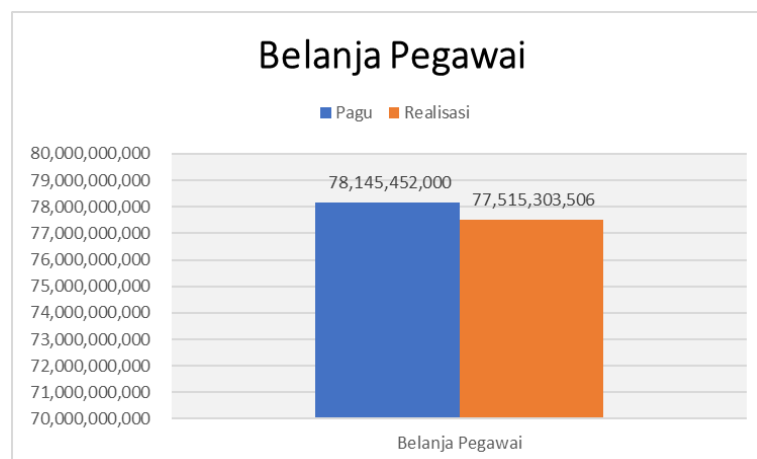


D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran adalah perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY Adalah Rp.139.881.530.000 dengan realisasi sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada Tahun 2024 sebagai berikut :

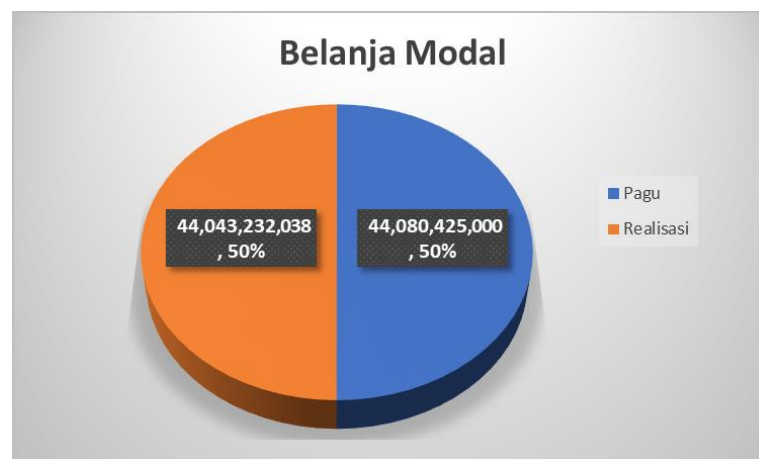
a. Belanja Pegawai : Rp.77.515.303.506 (99,19%) dari total pagu Rp.78.145.452.000



b. Belanja Barang : Rp.17.404.419.067 (99,19%) dari total pagu Rp.17.655.653.000



- c. Belanja Modal : Rp.44.043.232.038 (99,92%) dari total pagu
Rp.44.080.425.000



- d. Belanja Bantuan Sosial : Rp 0 (0 %)



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2024 dalam mendukung visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang. Demikian Laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.



Daftar Lampiran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmin Afif

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Nizar

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 60% (persen).

Pihak Kedua



Nizar

Semarang, 18 Desember 2023

Pihak Pertama,

Masmin Afif

REVISI LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			VOLUME	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	90	Nilai
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	100	%
		3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	487	Orang
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	2.000	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	100	%
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	300	Orang
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	5	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	605	Lembaga/ Orang
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	56	Kegiatan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama,	70	%

		tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	72	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	70 80 647 10	% % Orang Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	162	Konten/ Kegiatan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam	100 100 100 100	% % % %

		moderasi beragama		
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	%
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	12	Kegiatan
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	1	Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	100	%
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an	1	%

11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	15	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	63	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	13	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodifikasi dan digitalisasi	5	KUA
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	18	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	60	Paket
		2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	525	Buah
		3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	70	%
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	58	Layanan
		5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	250	Lokasi
		6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina	20	Orang
		7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	1	Lokasi
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	3	KUA

24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	100	%
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	94,79	%
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	91,60	%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	85	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	100	%
		3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	3	Madrasah
		4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	16	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	90	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	90	%
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	17	Penghargaan
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah	9	Kegiatan

		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	5	KUA
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	11.200	Orang
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	4.630	Anak
		5. Jumlah penghulu yang dibina	47	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/ kristiani/bahagia/sukinah/ hittasukhaya	215	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	100 0,06	% %
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95,76	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	100	%
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	89,29 74,23	% %

		keagamaan		
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	100	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	80	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	100	%
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	85	%
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	100	%
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	%
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	90	%
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	90	%

		4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	68	%
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	100	%
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/ Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	75	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagianak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	27.200	Siswa
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah	1.183	Siswa
		3. Persentase siswa madrasah penerima PIP	19	%
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	40	%
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	5	%
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	3	%
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	30	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	11.300	Siswa

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	40	%
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	80	%
		3. Persentase kepala madrasah/pengawas dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	80	%
		4. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	65	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	90	%
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	92	%
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	70	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	40	%
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	60	%

		3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1	98	%
		4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	1	Orang
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	45	Madrasah
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	2	Sekolah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	78	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	58	%
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	%
37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	%
		3. Persentase kepala	100	%

		pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 4. Persentase madrasah yang ramah anak. 5. Presentase sekolah keagamaan yang ramah anak	80 50	% %
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	71 2 60	Madrasah Sekolah Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	100 100 2	% % Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	90	%
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,	100 100	% %

		pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu 7. Persentase data ASN yang diupdate 8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	75 100 100 75 100 75	% % % % % %
42	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	164 97 99 100	Laporan % % %

43	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	80	%
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	96	%
		3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN	95	%
44	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	75	%
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	%
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80	%
45	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	90	%
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	35	Satker
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	35	Orang
46	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	95	%

		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	%
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	75	%
47	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	90	%
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	85	%
48	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	90	%
49	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	97	%
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	95	%
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	95	%
50	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	94	%
51	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	3.900	Konten
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang <i>discounter</i>	97	%

52	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	95	%
53	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	4.200	Orang

Nilai Kinerja Anggaran / NKA : 95

Kode	Nama Program / Kegiatan	Anggaran
DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	17.602.130.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	9.655.548.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	664.000.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.419.800.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	635.000.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	73.080.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	34.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	849.000.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.427.000.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.260.260.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	468.150.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	274.280.000
2148	Pembinaan Haji	176.564.000
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	665.448.000
DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	34.084.933.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	33.083.413.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	34.520.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	-
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	480.000.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	487.000.000
DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	43.055.260.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	7.864.132.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	32.519.608.000
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah	369.576.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	805.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	628.704.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	365.240.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	411.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	92.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	33.174.936.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	37.500.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	425.000.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	13.240.000.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	150.000.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	225.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	8.746.169.000

2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	222.153.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	4.877.912.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	980.357.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	1.057.695.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	75.000.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	192.569.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	309.400.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	-
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	2.060.072.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	195.000.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	121.109.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	-
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	260.000.000
TOTAL		127.917.259.000

Atasan Pimpinan Satuan Kerja.



Yogyakarta, 19 Februari 2024

Pimpinan Satuan Kerja

Masmin Afif



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perlu disusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- b. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya penerapan asas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022;



- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun LKj adalah :
- 1. Menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Mengolah data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Mendokumentasikan data dan laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 5. Melaporkan hasil analisis akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 April 2024,

KEPALAKANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 256 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

- Penanggungjawab : Dr. H. Masmin Afif, S.Ag, M.A
Koordinator : H. Muntolib, S.Ag, M.S.I
Ketua : Anas Effendi, S.M
Sekretaris : Eko Putro Doreri, S.Kom
Anggota :
1. Dini Meiyanti, SE.,M.Si
 2. Ngaisah,SE.,MAB
 3. Yunny Astuti, SE
 4. Yuwanita Wahyudi, SH
 5. Fatakhul Huda, S.E
 6. Findita Dewi Setiasari, S.Psi, M.A
 7. Joko Triyanto Nugroho, SE
 8. Venawatie Yenny Astutie, S.H
 9. Kurnia Wulandari, S.Si
 10. Brama Aji Putra, S.Kom.I
 11. Raudhah Al Janah, SE
 12. H. Moh Ridwan Afandi, S.H.I
 13. Yeni Retnowati, S.E
 14. Endri Susilowati, SE
 15. Maslakhah, S.Ag
 16. Aziz Shahroni, S.Ag
 17. Dwi Asti Suspanti, S.H
 18. Christina Sarmini
 19. Surahman, S.Ag
 20. Purwanto, M.Pd.H
 21. Noer Faidah Maharini, S.Ag, M.S.I
 22. Ahmad Kurnia Anshorudin, S.Kom
 23. Tyas Wening Damayanti, S.E
 24. Meitty Widarta, S.E
 25. Muzayin Helmy, S.H

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MASMIN AFIF

